

Pendidikan Islam Dalam Pluralisme Agama

Oleh Aden Wijdan SZ

Pembantu Dekan II dan Dosen Fakultas Tarbiyah UII Yogyakarta

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini, ternyata

mampu mempengaruhi masalah-masalah substansial kehidupan manusia, bahkan mampu merambah sampai pada aspek dan pranata sosial yang telah mapan sekalipun. Suasana yang sangat bercorak industrialistis ini, juga membentuk budaya-budaya baru (moderen) dalam kehidupan masyarakat, dengan

aksentuasi model cenderung mengacu pada corak materialistis, individualistis, dan pragmatis.

Dalam situasi yang demikian, eksistensi pendidikan sebagai asset sosial, mengalami degradasi fungsional, karena arahnya semakin tertuju pada sasaran-sasaran material-

Suasana yang sangat bercorak industrialistis ini, juga membentuk budaya-budaya baru (moderen) dalam kehidupan masyarakat, dengan aksentuasi model cenderung mengacu pada corak materialistis, individualistis, dan pragmatis

istik (M. Rusli Karim, 1991:127). Padahal, baik atas pengalaman sendiri, maupun pengalaman bangsa

lain, pendidikan selalu tidak mampu melampaui kemajuan yang dicapai perubahan, dan dengan begitu, maka pendidikan menjadi terjebak pada kecenderungan dan ketidakmampuan mempertahankan aspek fungsional yang disandangnya.

Dalam konteks tersebut, persoalan

yang dihadapi lembaga pendidikan Islam jauh lebih mendasar, karena masalahnya justru mendobrak aspek idealita tujuannya. Di satu sisi, pendidikan Islam secara umum belum sepenuhnya diarahkan pada tujuan untuk sekaligus menguasai IPTEK, termasuk kelompok Madra-

sah yang baru menampakkan diri sebagai pendidikan umum plus. Di sisi lain, apa yang dibawa perubahan sosial dengan budaya moderennya itu, justru menjadi tantangan yang masih sulit dijawab pendidikan Islam yang sarat dengan beban sebagai model pembina moral atau budi pekerti secara absolut dan di tengah tantangan pluralisme agama.

Kaitan dengan perkembangan dan penguasaan IPTEK, boleh jadi dapat dipisahkan dari wilayah tanggungjawab pendidikan Islam, karena hal ini telah diperankan dengan baik oleh pendidikan umum. Tapi tidak berarti bahwa lembaga pendidikan Islam tidak perlu mengenal sama sekali kemajuan IPTEK, karena aspek tersebut juga merupakan bagian penyempurna proses pembinaan moral bangsa yang harus dilakukannya.

Aspek ini dapat dianggap memadai manakala tahap-tahap pengenalan dapat dilakukan dengan baik, karena sebagai satu sistem sosial, pendidikan Islam dapat memelihara hubungan dengan masyarakat, yang sejalan dengan perkembangan dan pergeseran yang terjadi di dalamnya. Apalagi jika mampu menguasainya. Tetapi ba-

gaimanakah eksistensi pendidikan Islam sebagai pembina moral bangsa yang dinilai masih cenderung eksklusif ditengah realita pluralisme agama?

Pertanyaan ini penting diajukan karena pola hubungan dalam masyarakat, semakin terarah pada pembauran yang meleburkan sekat-sekat baik sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat, dan termasuk di dalamnya sistem keyakinan setiap individu. Pembatasan hanya terjadi pada pola ketergantungan dan sangat mengutamakan aspek fungsional.

Namun begitu, pada batas-batas tertentu, hubungan-hubungan normatif keagamaan yang pluralis itu, tetap saja menjadi *crucial point*. Ini sangat nyata bagi lapisan-lapisan tertentu dalam masyarakat yang dinilai tidak mampu memahami dan mensosialisasikan

**bagaimanakah
eksistensi
pendidikan Islam
sebagai pembina
moral bangsa yang
dinilai masih
cenderung
eksklusif ditengah
realita pluralisme
agama?**

human relation secara sempurna. Sehingga, kesenjangan-kesenjangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sekali waktu dapat saja menjadi pemicu timbulnya situasi "amuk" sebagaimana yang merebak belakangan ini. Di sini agama digunakan sebagai argumentasi

kesadaran dalam "menggerakkan" amuknya.

Eksistensi Pendidikan Islam

Pembicaraan tentang keberadaan pendidikan Islam yang dimaksudkan disini, harus dipahami menurut definisi yang spesifik, yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga, yang di dalamnya sekaligus tercermin proses pembelajaran yang bercorak Islam. Maksudnya, lembaga pendidikan Islam yang melakukan proses pembelajaran agama Islam, dengan ilmu-ilmu bantu lainnya, yang secara dikhotomis sering disebut sebagai ilmu umum.

Terlepas dari ran-
cu atau tidak per-
soalan yang disebut
dikhotomis di atas,
lembaga pendidikan
Islam tetap menye-
lenggarakan proses
pembelajaran yang
bernuansa agamis
dan sekaligus meru-
pakan proses alih
nilai (*transfer of value*)
dan dikembangkan
dalam kerangka pe-
rubahan perilaku (A. Watik Pra-
tiknya, 1991:99). Ahli pendidikan
Islam dari Timur Tengah seperti
Mohammad Athiyah al-Abrasyi, Syed
Sajjad Husein, Syed Ali Ashraf, dan
lainnya, bahkan mengajukan asum-
si yang lebih terarah, bahwa pen-
didikan Islam merupakan proses

pembelajaran yang sangat intens
pada post pembentukan kepriba-
dian, budi pekerti yang luhur (me-
nurut ukuran Islam), atau dengan
menggunakan bahasa-bahasa lain
yang mempunyai arti lebih kurang
sama.

Asumsi yang demikian adalah
nyata dalam proses pembelajaran
pada pendidikan Islam kita. Anak
didik dituntun untuk bersikap,
bertingkah laku, dan berkomitmen
menurut ajaran agamanya. Selain-
nya itu, tidak tampak menonjol da-
lam proses pembelajarannya, se-
hingga merekatkan pula anggapan

ini terhadap lemba-
ga pendidikan Ma-
drasah yang se-
sungguhnya mulai
membentuk jatidiri
menjadi pendidik-
an umum plus.

Kondisi ini se-
sungguhnya tidak
mungkin lagi dipan-
dang dalam makna
absolut yang seder-
hana. Sebab, situasi-
nya hanya menje-
bak keberadaan pen-
didikan Islam pada

**situasinya hanya
menjebak keberadaan
pendidikan Islam
pada suatu
eksklusifisme di
tengah tuntutan model
dan tujuan
kosmopolit, sebagai
bentuk upaya dalam
merespon perubahan.**

suatu eksklusifisme di tengah tun-
tutan model dan tujuan kosmopolit,
sebagai bentuk upaya dalam
merespon perubahan. Bukankah
kita sendiri telah jauh memahami,
bahwa seseorang akan kalah ber-
saing tanpa profesionalisme yang
jelas mampu merespon perubahan

dan memenuhi logika persaingan. Atas kekurangan ini, maka di duga kuat bahwa seseorang akan sulit atau bahkan tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya sekalipun mampu sangat alim, karena kalah bersaing dalam kehidupan sosial moderen yang dijalaninya.

Perlunya persoalan ini dicermati secara lebih arif, terutama mengingat pertimbangan perjalanan pendidikan Islam dan bangsa ini yang mayoritas muslim untuk jangka waktu yang amat panjang. Apabila sikap-sikap pragmatis masyarakat yang mulai tumbuh pada kurun waktu terakhir terus merebak dan berkembang serta ditunjang oleh pergeseran model pemikiran ke wilayah rasionalitas, maka masyarakat akan cenderung mengutamakan perbaikan kualitas hidup secara fisik (ekonomi). Bagaimanapun juga, gejala ini secara universal akan berdampak pada kecenderungan pengabaian atau penurunan pertimbangan kualitas hidup secara normatif, atau sekurang-kurangnya menginginkan hal ini dapat berjalan bersamaan sekaligus.

Dalam kondisi yang demikian, maka pendidikan Islam yang tetap pada bertahan model yang seka-

aspek pragmatisme dan pertimbangan rasional akan lebih hidup, dan ini akan merugikan pendidikan Islam, karena dinilai hanya bernuasa moral semata, dan akan dinilai kurang memberi pengharapan peningkatan kualitas hidup secara ekonomi

rang ini, terutama kelompok non Madrasah, akan menerima pemaknaan yang lebih terbatas oleh masyarakat, sekalipun sesungguhnya dipahami bahwa pendidikan sepenuhnya bermuara pada upaya penggalan potensi moral dan intelektual anak didik. Atau, masyarakat masih mencintai lembaga pendidikan, tapi anaknya lebih cenderung di dorong untuk memasuki pendidikan umum. Dengan begitu, aspek pragmatisme dan pertimbangan rasional akan lebih hidup, dan ini akan merugikan pendidikan Islam, karena dinilai hanya bernuasa moral semata, dan akan dinilai kurang memberi pengharapan peningkatan kualitas hidup secara ekonomi.

Pendidikan Islam dan Pluralisme agama

Islam dengan berbagai nuansa normatif yang dibawanya, sebenarnya dengan jelas lebih berorientasi pada suatu universalisme, dan berkembang atas prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Dengan berbagai atribut dan rambu-rambu yang ada di dalamnya itu, Islam lebih menempatkan diri pada gejala dan kecenderungan humanis yaitu Islam yang mengajarkan dan menyukai per-

sahabatan, perdamaian, dan kerukunan (*Muslih Usa*, 1996:41-42).

Kesadaran akan hal tersebut, pada bagian-bagian tertentu tercermin pula dalam pendidikan Islam, sekalipun belum berlangsung secara universal. Namun kekurangan ini sekaligus menjadi bagian penyebab yang menempatkan pendidikan Islam pada posisi tidak dapat menjauhkannya pada label sebagai lembaga dan pendidikan Islam proses yang cenderung eksklusif.

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka sampai jangka waktu tertentu, boleh jadi hal ini tidak menjadi persoalan yang rumit. Sekurang-kurangnya kita melihat realita, bahwa pendidikan Islam kita tidak memproduksi militan-militan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, mengenai perilaku-perilaku individual, anak didik pendidikan Islam dapat tampil lebih santun di banding produk pendidikan pada umumnya. Belum ada bukti yang jelas, bahwa peserta didik dari lembaga pendidikan Islam "memprakarsai" tawuran antar pelajar seperti yang sering terjadi dalam kurun waktu terakhir ini.

Namun kekurangan ini sekaligus menjadi bagian penyebab yang menempatkan pendidikan Islam pada posisi tidak dapat menjauhkannya pada label sebagai lembaga dan pendidikan Islam proses yang cenderung eksklusif

Persoalan tersebut benar jika dipahami secara sederhana atau sebatas penggambaran strategi pengembangan dan penggalan potensi anak didik sebagai produk, dan pendidikan Islam sebagai produsen. Namun, untuk jangka panjang kita tidak boleh melupakan bahwa produk pendidikan Islam kelak akan bergabung dengan lingkungan riil kehidupan masyarakat. Di sini dapat dijelaskan, bahwa lingkungan masyarakat akan kembali menguji dan mengolah produk pendidikan Islam menjadi produk baru yang harus bersaing dalam

keramaian massa dengan berbagai asal produk di dalamnya.

Secara kultural dan struktural serta bercermin pada kamata rasionalitas, tuntutan profesional yang bercorak industrialis secara umum sulit direspon oleh produk pendidikan Islam. Di sinilah akar per-

soalannya, karena profesionalisme di bidang selain agama rata-rata tidak dimiliki produk pendidikan Islam, maka akan memberikan kesulitan bagi mereka dalam mengaktualisasikan diri dalam perubahan, dan akan semakin terdramatisir karena situasinya juga

ditekan oleh asumsi umum atas keberadaannya yang eksklusif.

Formulasi ketidakberdayaan ini, diakui lebih disebabkan oleh proses pendidikan yang cenderung memenangkan akhirawi dan mengalahkan duniawi (A. Syafii Maarif, 1996:10). Dari sini lahir sikap *loneliness* atau rasa sepi yang mendalam (Koetjaraaningrat, 1987:IV), karena tertinggal dari kelompok besar yang mampu mengangkat kualitas dalam masyarakat. Akhirnya jadilah kelompok ini sebagai kalangan yang hanya mampu menghakimi orang yang memenangkan duniawi; sebagai *performance* kalangan yang mampu mengaktualisasikan diri dalam perubahan.

Rasa frustrasi yang demikian, tidak bisa diabaikan sebagai persoalan sosial yang biasa. Sebab, kekalahan bersaing dalam era budaya dan masyarakat moderen, selalu akan berakhir dengan konflik, karena di dalamnya telah terjadi kesenjangan atau ketidakselarasan dalam hidupnya (Johan Galtung, 1991:132-133). Ini adalah salah satu dampak negatif postmodernisme yang mempunyai struktur fundamental pemikiran dekonstruksisme, relativisme, dan pluralisme (M. Amin Abdullah, 1995:99-105).

Akhirnya jadilah kelompok ini sebagai kalangan yang hanya mampu menghakimi orang yang memenangkan duniawi; sebagai performance kalangan yang mampu mengaktualisasikan diri dalam perubahan

Era pluralisme disini digambarkan sangat universal. Di dalamnya ada pluralisme budaya, ekonomi, politik, teknologi, kebudayaan, dan tentu pluralisme agama. Dari keberagaman atau kemajemukan ini, kecuali agama, mempunyai kedinasan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan keinginan manusia. Sedangkan agama, secara prinsipil tetap menempati postnya yang telah baku, dan perkembangannya hanya terakomodasikan pada wujud nilai-nilai agama yang tidak boleh berubah.

Dalam kaitan dengan kesejangan yang akan timbul seiring dengan kemajuan budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, maka perbedaan kepentingan dan oleh kalangan tertentu hanya mampu diakses dengan sikap yang sangat apologis, menjadi tidak terhindarkan, dan akan berakhir dengan perbedaan-perbedaan

sikap dan pandangan yang dapat kita sebut konflik. Dalam konteks ini, maka pluralisme agama dapat menjadi post yang krusial, mengingat, *pertama*, kelompok agama lebih mudah menyatukan massa bahkan di banding ras atau etnis yang besar sekalipun. *Kedua*, kandungan

agama (ajaran) justru menjadi standarisasi alat penilai dalam menghakimi kelompok yang dapat eksis secara sempurna dalam perubahan. Dan *ketiga*, kelompok moralitas kita justru menjadi frustrasi karena kesulitan membenahi kualitas hidupnya.

Sekalipun proyeksi terhadap output lembaga pendidikan Islam dapat berubah kelak suatu saat seiring dengan perbaikan sistem dan mampu keluar dari eksklusifitasnya, realita kini masih terbatas pada titik krusial bagi masa mendatang. Sebab, profesionalisme yang dimilikinya sekarang ini, belum menjembatani pada tuntutan peningkatan kualitas hidupnya di tengah pluralisme budaya, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Situasi inilah yang sangat senjang dan berbeda dengan produk pendidikan pada umumnya.

Dari sisi ini dapat digambarkan suatu diagnosis, bahwa kekuatan moral agama saja, belum cukup untuk memenangkan persaingan dalam era global ini. Bahkan dominasi moral (agama) semata atau tidak disertai modal untuk dapat merespon perubahan (tuntutan profesionalisme dalam bidang selain agama), justru tidak kondusif

bagi pemeliharaan konsisten yang harus pula tumbuh. Atau bahkan situasi ini dapat terdramatisir sehingga menumbuhkan perilaku anti kemapanan dan agama menjadi pengukur untuk bersikap bahwa dalam masyarakat telah timbul ketidakadilan, ketidakbenaran, dan sebagainya. Dan di sini, sekali lagi, faktor agama potensial sebagai penghimpun massa setelah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan atau kehidupan berseberangan karena alasan apapun juga.

Taksonomi Pendidikan Islam

**dominasi moral
(agama) semata atau
tidak disertai modal
untuk dapat merespon
perubahan (tuntutan
profesionalisme dalam
bidang selain agama),
justru tidak kondusif
bagi pemeliharaan
konsisten yang harus
pula tumbuh**

Pendidikan Islam pada umumnya, dinilai masih sangat penting untuk menjadi salah satu aset sosial dan sekaligus sebagai bingkai "polisi moral" di negeri yang mayoritas muslim ini. Untuk mempertahankan keberadaan pendidikan Islam yang disegani, diminati, dan terhindar dari persepsi marginal, maka mau tidak mau, ia dituntut dan harus memperbaharui perencanaan, mengembangkan kurikulum, implementasi, dan evaluasinya. Sikap ini harus dapat ditunjukkan dengan serius, sehingga tidak menggambarkan sekadar tambal sulam seperti dengan

memberikan keterampilan-keterampilan khusus yang tetap hanya menempatkan outputnya pada kelas marginal.

Pada tingkat tertentu dan memberikan gambaran yang cerah, penciptaan suasana yang responsif ini dan memenuhi logika persaingan, mulai dilakukan kelompok Madrasah, sekalipun terkesan lambat. Sikap ini, harus diikuti oleh berbagai jenis dan jenjang pendidikan Islam lainnya, namun tidak memberikan gambaran sebagai pendidikan umum plus semata.

Keputusan baru tersebut, memang belum secara absolut mengeluarkan pendidikan Islam dari asumsi eksklusif, tetapi mampu (ini yang lebih penting), menuntun produknya untuk bersikap terbuka karena pencapaian kualitas hidupnya dapat lebih terjamin. Ini mempunyai arti, bahwa mereka dapat menyatu dengan kalangan yang telah lebih dulu mampu mengkatuliskan diri dalam perubahan, sehingga tidak tercipta kelompok yang menghakimi dan yang dihakimi.

Bangunan kebersamaan yang demikian ini, akan menciptakan ukhuwah nasional, baik *basyariyah* maupun *wathaniyah*, sebagai pilar

dan modal yang menjamin kelurusan perjalanan pluralisme agama. Sebab, kegoncangan hubungan antar umat beragama tidak timbul dari ajaran agama, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kultural dan sosiologis suatu komunitas yang frustrasi, terutama karena realita ketidakmampuan meningkatkan kualitas hidupnya, di tengah kemajuan, kemegahan, dan kemewahan yang dicapai orang lain.

Untuk itulah perlunya taksonomi baru bagi perjalanan dan keberadaan pendidikan Islam kita. Dengan begitu, maka misi moralnya-

kegoncangan hubungan antar umat beragama tidak timbul dari ajaran agama, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kultural dan sosiologis suatu komunitas yang frustrasi, terutama karena realita ketidakmampuan meningkatkan kualitas hidupnya

pun dapat pula memenuhi pengharapan, karena outputnya merambah dan menyebar secara merata ke semua sektor kehidupan. Penyebaran generasi produk pendidikan Islam inilah yang harus ditargetkan, karena hanya strategi ini yang membuat mereka dapat berperan untuk mem-

bantu meluruskan perjalanan bangsa, yang tidak terhindarkan dari berbagai pengaruh negatif alat memajukan bangsa yang juga sangat kita butuhkan itu. Tetapi sekali lagi, bahwa mereka harus dibekali dengan profesionalisme yang responsif terhadap era dan arus perubahan.

Kepustakaan

Abdullah, M. Amin, 1995., *Filsafat Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Galtung, Johan, 1991., "Suatu Teori Struktural Tentang Imperialisme", dalam Amir Effendi Siregar (ed), *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Karim, M. Rusli, 1991., "Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Transformasi Sosial Budaya", dalam Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia "Antara Cita dan Fakta"*, Yogyakarta : Tiara Wacana

Koentjaraningrat, "Gotong-royong Dalam Kebudayaan Indonesia (Bag. III)", dalam KOMPAS, 02/07/1987.

Maarif, Ahmad Syafii, 1996., "Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Umat", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah UII Nomor 2 Tahun I 1996, Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UII Yogyakarta.

Pratiknya, Ahmad Watik, 1991., "Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia", dalam Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia "Antara Cita dan Fakta"*, Yogyakarta : Tiara Wacana

Usa, Muslih, 1996., "Wacana Islam Politik dan Islam Humanis di Indonesia", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah UII Nomor 2 Tahun I 1996, Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UII Yogyakarta.